

Implementasi Kebijakan Benchmark dalam Mendeteksi Tingkat Kemampuan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021

Ratu Wilandari¹, Siti Hamidah Rustiana², Suhendri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeuy, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten
ratuwilandari@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze whether or not there are significant differences in the ability of taxpayers with the Benchmark Policy from the Directorate General of Taxes. The data used in this study is secondary data in the form of company financial reports that have been published on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 to 2019. The population in this study was 26 companies in the Food and Beverage Industry Sub Sector. The method used in determining the sample is purposive sampling including companies listed on the Indonesia Stock Exchange ($N=55$ and $T=5$ years). This research uses hypothesis testing using paired sample t-test with panel data. The results of the model test show that: 1) The results of the analysis show that there is a significant difference between GPM WP Agency and GPM Benchmarking DGT for Manufacturing Companies in the Food and Beverage Industry Sub Sector listed on the Indonesia Stock Exchange, 2) The results of the analysis show that there is a significant difference between OPM WP Badan with OPM Benchmarking DGT for Manufacturing Companies in the Food and Beverage Industry Sub Sector listed on the Indonesia Stock Exchange, 3) The results of the analysis show that there is a significant difference between PPM WP Badan and PPM Benchmarking DGT for Manufacturing Companies in the Food and Beverage Industry Sub Sector listed on the Indonesia Stock Exchange, 4) The results of the analysis show that there is a significant difference between the CTTOR WP Agency and the CTTOR Benchmarking DGT in Manufacturing Companies in the Food and Beverage Industry Sub Sector listed on the Indonesia Stock Exchange

Keywords: Benchmarking, Company Capability, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Pretax Profit Margin, Corporate Tax to Turn Over Ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan signifikan kemampuan wajib pajak dengan Kebijakan Benchmark dari Direktorat Jenderal Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 26 perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu *purposive sampling* meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ($N=55$ dan $T=5$ tahun).. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis menggunakan uji paired sample t-test dengan data panel. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa : 1) Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara GPM WP Badan dengan GPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2) Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara OPM WP Badan dengan OPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 3) Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara PPM WP Badan dengan PPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 4) Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara CTTOR WP Badan dengan CTTOR Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kata Kunci: Tolok Ukur, Kemampuan Perusahaan, Margin Laba Kotor, Margin Laba Operasi, Margin Laba Sebelum Pajak, Rasio Perputaran Pajak Perusahaan

Copyright (c) 2023 Ratu Wilandari, Siti Hamidah Rustiana, Suhendri

 Corresponding author: Ratu Wilandari

Email Address: ratuwilandari@gmail.com (Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeuy, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 05 February 2023, Accepted 11 February 2023, Published 20 February 2023

PENDAHULUAN

Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN-nya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini (syafi'i, 2017). Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) pemerintah setiap tahunnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk negara guna mendanai kebutuhan negara baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Dalam APBN dijelaskan bahwa penerimaan pajak negara adalah menjadi salah satu pendapatan negara yang terbesar nilainya dan berasal dari dalam negeri

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak memperlakukan pajak sebagai beban dan beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan. Wajib Pajak (WP) Badan wajib melunasi pajak dan hal tersebut berarti akan mengurangi laba bersih Wajib Pajak. Pajak sebagai pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ira, 2020).

Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan perlawanan antara perusahaan sebagai Wajib Pajak dan pemerintah sebagai penerima pajak. Perlawanan ini merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Dalam penelitian Ira 2020, yang dilakukan pada KPP Pratama Semarang Barat. KPP Pratama tersebut merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab mengumpulkan dana yang berasal dari pajak dengan jangkauan wilayah kerja Semarang Barat.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka, karena penelitian ini mengolah rasio – rasio keuangan dan menginterpretasikannya dalam bentuk presentase. Sedangkan untuk sumber data merupakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau melalui suatu perantara media tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Laporan Keuangan untuk perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia maupun website dari masing-masing perusahaan.
2. Untuk rasio total benchmarking berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-139/PJ/2010, yang dapat di akses melalui website Pajak Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Benchmark dalam mendeteksi tingkat kepatuhan dan kemampuan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021 dan memiliki laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-

2021. Teknik analisisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan uji beda dua rata-rata (paired sample T-test) dengan menggunakan software Eviews versi 9.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data kinerja laporan keuangan yang diukur dengan rasio gross profit margin, rasio operating profit margin, Pretax Profit Margin dan Corporate Tax to Turn Over Ratio yang disandingkan dengan benchmarking dari DJP atas rasio yang sama berdasarkan surat edaran SE-139/PJ/2010. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel dalam penelitian terkain mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian untuk menilai tingkat kemampuan perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021

Deksripsi	GPM_WP	OPM_WP	PPM_WP	CTTOR_WP
Mean	0.252082	0.086693	0.076220	0.020567
Median	0.259250	0.083606	0.074972	0.022324
Maximum	0.561066	0.369296	0.238215	0.064922
Minimum	0.062105	-0.129690	-0.265994	-0.079030
Std. Dev.	0.135144	0.084530	0.096222	0.023788

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dilihat nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan nilai rata-rata (mean) dari masing-masing variabel untuk periode 5 tahun rasio kinerja perusahaan. Diketahui bahwa nilai rata-rata gross profit margin (GPM) untuk periode rata-rata 5 tahun kinerja perusahaan sebesar 0.252082 dengan standar deviasi sebesar 0.135144. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari pada nilai rata-rata menunjukkan tidak terdapat perbedaan besar antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Diketahui bahwa nilai rata-rata rasio operating profit margin (OPM) untuk periode rata-rata 5 tahun kinerja perusahaan sebesar 0.086693 dengan standar deviasi sebesar 0.084530. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari pada nilai rata-rata menunjukkan tidak terdapat perbedaan besar antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Diketahui bahwa nilai rata-rata rasio pretax profit margin (PPM) untuk periode rata-rata 5 tahun kinerja perusahaan sebesar 0.076220 dengan standar deviasi sebesar 0.096222. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan terdapat perbedaan besar antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Diketahui bahwa nilai rata-rata rasio corporate tax to turn over ratio (CTTOR) untuk periode rata-rata 5 tahun kinerja perusahaan sebesar 0.020567 dengan standar deviasi sebesar 0.023788. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan terdapat perbedaan besar antara nilai maksimum dengan nilai minimum.

Perhitungan Benchmarking dalam mendeteksi tingkat kepatuhan dan kemampuan Wajib Pajak Badan

Dalam penelitian ini, dasar kebijakan benchmarking yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-139/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan KLU Nomor 53220 terkait perusahaan makanan dan minuman. Dengan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-139/PJ/2010 yang dibagi menjadi 2 kategori penilaian sebagai berikut :

1. Kategori 0 artinya Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran pajak, dimana nilai Benchmarking-score perusahaan atas rasio GPM < 0,1882, OPM < 0,0737, PPM < 0,0547 dan CTTOR < 0,017.
2. Kategori 1 artinya Wajib Pajak memiliki kemampuan dalam pembayaran pajak, dimana nilai Benchmarking-score perusahaan atas rasio GPM > 0,1882, OPM > 0,0737, PPM > 0,0547 dan CTTOR > 0,017.

Dari perolehan perhitungan benchmarking pada laporan keuangan sampel Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan *Benchmarking* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Periode 2016-2020

No.	Emiten	Tahun	Kinerja Wajib Pajak				Benchmarking DJP No. SE-139/PJ/2010				Benchmarking Score			
			GPM	OPM	PPM	CTTOR	GPM DJP	OPM DJP	PPM DJP	CTTOR DJP	GPM-B	OPM-B	PPM-B	CTTOR-B
1	ALTO	2017	0,1571	-0,1297	-0,2660	- 0,0790	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
2		2018	0,0991	-0,0790	-0,1574	- 0,0436	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
3		2019	0,1219	-0,0162	-0,0322	- 0,0108	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
4		2020	0,1163	0,0007	-0,0275	0,0052	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
5		2021	0,0983	0,0132	-0,0198	- 0,0046	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
Rata-Rata			0,1185	-0,0422	-0,1000	- 0,0266	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
6	CEKA	2017	0,0668	0,0378	0,0336	0,0084	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
7		2018	0,0756	0,0377	0,0340	0,0085	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
8		2019	0,1171	0,0880	0,0914	0,0223	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	1	1	1
9		2020	0,0922	0,0571	0,0641	0,0140	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	1	0
10		2021	0,0676	0,0424	0,0441	0,0092	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
Rata-Rata			0,0838	0,0526	0,0534	0,0125	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
11	ICBP	2017	0,3106	0,1467	0,1462	0,0467	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
12		2018	0,3193	0,1679	0,1678	0,0465	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
13		2019	0,3405	0,1750	0,1758	0,0491	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
14		2020	0,3693	0,3693	0,2135	0,0545	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
15		2021	0,3570	0,2052	0,1749	0,0358	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
Rata-Rata			0,3393	0,2128	0,1757	0,0465	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
16	INDF	2017	0,2817	0,1237	0,1082	0,0356	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
17		2018	0,2754	0,1246	0,1015	0,0339	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
18		2019	0,2966	0,1284	0,1142	0,0372	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
19		2020	0,3273	0,1577	0,1520	0,0450	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
20		2021	0,3268	0,1699	0,1455	0,0327	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
Rata-Rata			0,3015	0,1409	0,1243	0,0369	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
21	MYOR	2017	0,2390	0,1182	0,1051	0,0267	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
22		2018	0,2659	0,1092	0,0990	0,0258	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
23		2019	0,3164	0,1268	0,1081	0,0261	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
24		2020	0,2982	0,1157	0,1096	0,0239	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
25		2021	0,2481	0,0617	0,0555	0,0121	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	1	0
Rata-Rata			0,2735	0,1063	0,0955	0,0229	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
26	PSDN	2017	0,1394	0,0503	0,0384	0,0154	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
27		2018	0,1102	-0,0019	-0,0163	0,0186	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	1
28		2019	0,1329	0,0270	0,0036	0,0246	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	1
29		2020	0,1420	-0,0079	-0,0372	0,0212	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	1
30		2021	0,0621	-0,0543	-0,0795	0,0140	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0
Rata-Rata			0,1173	0,0026	-0,0182	0,0188	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	1
31	ROTI	2017	0,5250	0,1032	0,0747	0,0204	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
32		2018	0,5394	0,0703	0,0676	0,0216	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	1	1
33		2019	0,5542	0,1070	0,1040	0,0331	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
34		2020	0,5611	0,0795	0,0499	- 0,0026	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	0	1
35		2021	0,5434	0,1246	0,1144	0,0288	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1
Rata-Rata			0,5446	0,0969	0,0821	0,0203	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1

36		2017	0,1011	0,0282	0,0172	0,0032	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0
37		2018	0,1155	0,0236	0,0107	0,0025	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0
38	SKBM	2019	0,1269	0,0205	0,0025	0,0020	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0
39		2020	0,0997	0,0150	0,0043	0,0026	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0
40		2021	0,1380	0,0220	0,0115	0,0038	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0
Rata-Rata		0,1162	0,0219	0,0092	0,0028	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	0	0	0	0	0	0
41		2017	0,2593	0,0452	0,0299	0,0048	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	0	0	0
42		2018	0,2558	0,0518	0,0379	0,0073	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	0	0	0
43	SKLT	2019	0,2528	0,0634	0,0443	0,0092	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	0	0	0
44		2020	0,2661	0,0594	0,0444	0,0105	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	0	0	0
45		2021	0,2785	0,0724	0,0750	0,0127	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	1	0	1
Rata-Rata		0,2625	0,0585	0,0463	0,0089	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	0	0	0	0	0
46		2017	0,2171	0,1019	0,1021	0,0257	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
47		2018	0,2192	0,0996	0,1149	0,0246	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
48	STTP	2019	0,2713	0,0950	0,1728	0,0354	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
49		2020	0,2782	0,0836	0,2011	0,0377	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
50		2021	0,2492	0,0974	0,1847	0,0356	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
Rata-Rata		0,2470	0,0955	0,1551	0,0318	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1	1
51		2017	0,3762	0,1984	0,2121	0,0649	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
52		2018	0,3574	0,1631	0,1734	0,0452	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
53	ULTJ	2019	0,3763	0,2032	0,2210	0,0546	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
54		2020	0,3735	0,2286	0,2382	0,0523	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
55		2021	0,3589	0,2460	0,2330	0,0401	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1
Rata-Rata		0,3685	0,2079	0,2156	0,0514	0,1882	0,0737	0,0547	0,017	1	1	1	1	1	1

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

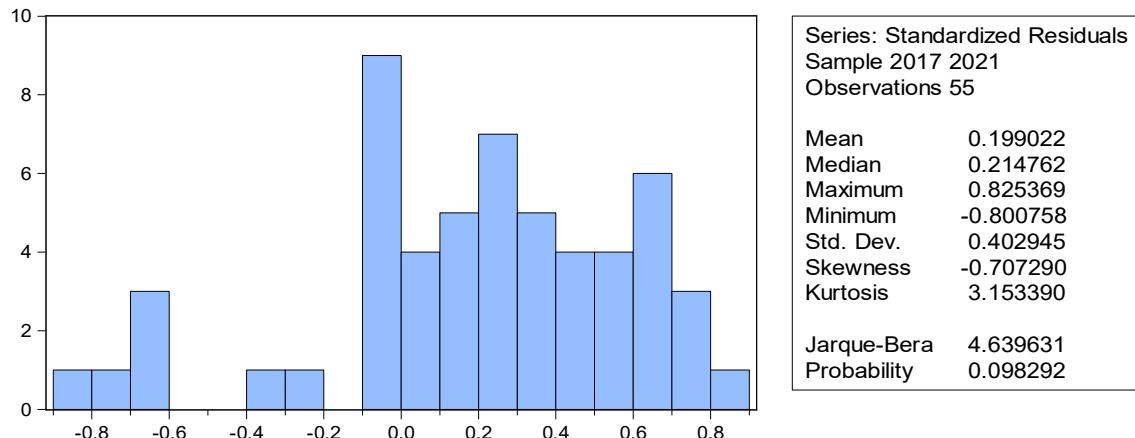
Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai *benchmarking* setiap tahunnya bervariasi, terdapat 5 emiten dengan kategori dibawah nilai benchmarking yaitu ALTO, CEKA, PSDN, SKBM dan SKLT adalah 0 atau diindikasikan tidak memiliki kemampuan pembayaran pajak menurut rasio kewajaran DJP.

Sedangkan kategori perusahaan memiliki kemampuan terdapat 6 perusahaan yaitu ICBP, INDF, MYOR, ROTI, STTP dan ULTJ. Keenam perusahaan manufaktur tersebut memiliki nilai rata-rata *Benchmarking score* adalah 1 yang artinya memiliki kemampuan dalam pembayaran pajak menurut rasio *Benchmarking DJP*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dengan eviews 9 yang membandingkan nilai Jarque-Bera (J-B) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ (5%). Berikut hasil uji normalitas pada model analisis:



Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 diatas, nilai Jarque-Bera sebesar 4.639631 dengan probabilitas sebesar 0,098292. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikannya ($0,098292 > 0,05$), oleh karena itu H_0 diterima dan dapat disimpulkan data kemampuan perusahaan dengan model *benchmarking score* berdistribusi normal.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab I – IV, berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian “Implementasi Kebijakan Benchmark dalam mendeteksi tingkat kemampuan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021” yaitu

Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara GPM WP Badan dengan GPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara OPM WP Badan dengan OPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara PPM WP Badan dengan PPM Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara CTTOR WP Badan dengan CTTOR Benchmarking DJP pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

REFERENSI

- Aritonang. 2018. Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Keuangan. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Barker, RL. 2017. The social work dictionary (5th ed.), NASW Press, Washington, DC.
- Caro, Jaime Vázquez. 2018. Benchmarking Tax Administrations in Developing Countries: A Systemic Approach: International Studies Program Working Paper..
- Damayanti, Theresia Woro dan Eko Sukmono Adiritonga. 2017. Ratio Total Benchmarking sesuaikah dengan Kondisi Wajib Pajak? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Surat Edaran Nomor. SE – 96/PJ/ 2009 tentang Rasio Total Benchmarking.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

- Jamz. 2018. Memahami Benchmarking. Forum PDAM Indonesia, 11 Juli 2018.
<http://pdambandarmasih.com/forumpdam>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Kinfack, Emilie Chanceline. 2019. Benchmarking Tax Compliance Efficiency Among South African Retail Firms Using Stochastic Frontier Approach. The Case of South Africa. International Journal of Public Administration, No 32: p.1124– 1146.
- Martwardojo, Agus. 2017. Menteri Keuangan: Realisasi Tax Ratio 2011 Naik Satu Persen [Online]. Didapatkan: <<http://www.pajak.go.id/content/menteri-keuangan-realisisasi-tax-ratio-2017-naik-satu-persen> [03> Februari 2021].
- Purnama, Budi. 2017. Pemanfaatan Total Benchmarking dalam Melakukan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan (Studi Kasus pada Wajib Pajak BPR di Sulawesi Utara). <http://Budipurnama.files.wordpress.com>, diakses tanggal 28 April 2021.
- Rahayu, Siti Kurnia 2019, Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal, Edisi Pertama, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2018. Perpajakan: Teori dan Kasus Jilid 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Riani, Rina Anggi. 2017. Analisis Komparatif Antara Rasio Keuangan Perusahaan Industri Farmasi dengan Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Salip, Wato Tendy. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, Vol 4.
- Sars. 2017. Determinants of Capital Structure and benchmarking Adjustment to Long-run. Target: Evidence from UK Company Panel Data. Journal of Business Finance and accounting, 28: 175-199.
- Septriadi. 2019. Manajemen Perpajakan dan Analisis Deteksi Dini terhadap Tax Evasion melalui Metode Benchmark. Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 8 Nomor 3 Agustus 2019. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Septriana, Ira. 2020. Tingkat kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. Januari 2020, From Jurnal DOI: 10.33633/jpeb.v5i1.3229 ISSN 2460 – 4291.
- Sianipar, WPJ Alejandro. 2017. Analisis Rasio Keuangan Industri Properti dan Real Estate Terkait Pajak Penghasilan Badan terhadap Rasio Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Periode 2013-2015. Tesis Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School. Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Soemitro, Rachmat. 1988. Asas dan Dasar Perpajakan 1, Cetakan 3. Bandung: PT. Eresco.
- Soemarso. 2008. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/ PJ/ 2011 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011

Syafii. 2017. Rasio total benchmarking sebagai indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada PT Semen Gresik (Persero), Tbk. 1 Maret, 2017, from Jurnal WIGA Vol. 3 No. 1 ISSN No 2088-0944.